

# Indimolor

G E L I T I K  
B E B A S P O L U S I



Laporan Utama \_\_\_\_\_  
Tak Ada Pilihan, *Dummy* Jadi Acuan

\_\_\_\_\_ Laporan Khusus  
Penerapan *E-vote* Parsial, Tujuan Tak Maksimal

Buletin LPM Indikator  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Edisi PEMILWA 2018



Indikator/Naufal

**Indimolor Gelitik Bebas Polusi** diterbitkan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan LPM Indikator FEB UB. **Redaksi:** Rifki(CO), Driantama, Puspita, Sischa, Yesica, Zia, Kezya, Ryo, Kezia, Chairunissa, Winda, Nabila, Danar, Nadira, Nisrina, Yoana, Yasser, Syahri, Isma, Riega, Aji, Salsa, Asyadia, Raffi, dan tim pendukung. **Tata Letak:** Tim kreatif Indikator. **Alamat Redaksi/Pemasaran:** Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan FEB UB, Jalan MT. Haryono 165 Malang 65145 (085749693766). **Email:** [lpmindikator@gmail.com](mailto:lpmindikator@gmail.com). **Web:** [lpmindikator.feb.ub.ac.id](http://lpmindikator.feb.ub.ac.id). Redaksi menerima tulisan dalam bentuk apapun. Naskah diketik dan dikirim dalam bentuk *softcopy*. Redaksi berhak menyunting tanpa mengurangi maksud dan tujuan penulisan. Tulisan dikirim ke alamat di atas.



@indiphotograph



@LPMindikator



@owc2290y

## Dorongan Tim Sejawat Memicu Semangat

Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PEMILWA KM FEB UB) merupakan sebuah pesta demokrasi untuk memilih wakil mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). LPM Indikator turut memeriahkan kegiatan dengan menerbitkan bulletin *Indimolor* edisi PEMILWA 2018.

Seiring berjalannya penggarapan, muncul permasalahan secara perlahan. Kurang koordinasi serta molarnya *timeline* penggarapan menjadi perkara yang tak bisa terhindar. Motivasi antar anggotalah yang menjadi penjaga semangat yang masih tersisa.

Laporan utama pada edisi kali ini menilik fenomena tentang calon tunggal DPM. Permasalahan ini terjadi beberapa tahun terakhir, namun terulang lagi di PEMILWA tahun ini. Sistem pemilihan baru dengan cara *E-vote* memberikan kesan berbeda dan menjadi pembahasan hangat di laporan khusus. Selain itu, rubrik lain hadir tidak kalah menarik dan dikemas untuk mengedukasi para pembaca.

LPM Indikator



Indikator/Yasser

## Tak Ada Pilihan, *Dummy* Jadi Acuan

Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PEMILWA KM FEB UB) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KM FEB UB. Pesta demokrasi terbesar bagi KM FEB UB bertujuan untuk memilih satu pasang Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB serta tujuh orang Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEB UB yang terdiri dari dua Anggota DPM tiap jurusan dan satu Anggota DPM Independen. “PEMILWA tidak hanya sekadar sebagai ajang pemilihan saja, tetapi juga sebagai ajang edukasi politik. PEMILWA ini bisa jadi salah satu ajang pembelajaran kita, salah satunya terkait politik dengan cara penerapannya yang langsung,” papar Ketua Pelaksana PEMILWA KM FEB UB 2018, **Farhan Hariardi Pratama**.

Rangkaian PEMILWA KM FEB UB dibuka dengan kegiatan Opening Ceremony pada tanggal 8 November 2018. Agenda berikutnya adalah pengambilan formulir yang berlangsung dari tanggal 9-12 November 2018

dan dilanjutkan dengan proses pengembalian formulir hingga 15 November 2018. Pemungutan suara pada tanggal 5 Desember 2018 menjadi puncak rangkaian PEMILWA KM FEB UB 2018 sementara Closing Ceremony pada tanggal 7 Desember 2018 menutup keseluruhan acara.

Secara historis fenomena calon tunggal telah terjadi pada PEMILWA KM FEB UB dalam tiga tahun terakhir sejak 2015. Menyiasati fenomena tersebut, syarat administratif bagi bakal calon DPM jurusan tahun ini dipermudah dengan diadakannya pengumpulan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). “Sudah disepakati untuk pendaftaran DPM jurusan persyaratan KTM dihapus lantaran sudah ada surat rekomendasi jurusan, enggak efektif kalau kita mengharuskan persyaratan KTM,” ujar Ketua Himpunan (Kahim) Jurusan Akuntansi, **Hafizh Anugerah Pratama**.

Solusi yang disediakan nyatanya belum dapat menanggulangi persoalan yang telah mendarah daging. Fenomena calon tunggal kembali terjadi pada tahun ini, bermula dari pengambilan dan pengembalian formulir

pendaftaran. Formulir tersebut diambil oleh masing-masing dua bakal calon DPM Jurusan Akuntansi dan Manajemen, tiga bakal calon DPM Jurusan Ilmu Ekonomi, serta satu orang bakal calon DPM Independen. Pengembalian formulir pendaftaran hanya dilakukan oleh seluruh bakal calon DPM Jurusan Akuntansi, dua bakal calon DPM Jurusan Ekonomi, dan satu bakal calon DPM Jurusan Manajemen. Setelah mencapai batas waktu terakhir, kuota bakal calon DPM Jurusan Manajemen dan Independen masih belum terpenuhi. Berdasarkan ketentuan dalam AD/ART KM FEB UB, panitia melakukan perpanjangan waktu hingga 7x24 jam untuk melengkapi kuota bakal calon DPM. Namun, setelah perpanjangan waktu tersebut kuota bakal calon DPM Independen tetap belum terisi, sehingga terlaksanalah Musyawarah Umum Mahasiswa (MUM) FEB untuk mencari bakal calon. Musyawarah tersebut menghasilkan tiga nama bakal calon DPM Independen. Bakal calon DPM yang dirumuskan di MUM FEB maksimal mengembalikan formulir pada keesokan harinya pukul empat sore sesuai kesepakatan forum. Namun, ketika seluruh bakal calon DPM Independen telah mengembalikan formulir tepat waktu, bakal calon DPM Jurusan Manajemen terlambat mengembalikannya. Hal ini jelas menyalahi kesepakatan yang tercetus di MUM FEB. “Karena dia terlambat, saya kembalikan lagi ke MUM FEB dan di MUM FEB pun bakal calon ini diragukan kredibilitasnya. Ibaratnya belum jadi DPM sudah seperti ini, harus dikejar-kejar dulu, jadi banyak orang yang beranggapan kalau bakal calon ini kurang pantas untuk menjadi representasi mahasiswa. Forum yang akhirnya menggugurkan,” ujar Farhan.

Lantaran keterlambatan bakal calon DPM Jurusan Manajemen, akhirnya diadakan MUM FEB kedua. Menurut hasil kesepakatan, bakal calon DPM Independen atas nama Sabil Al Rasyad dipindahkan ke bakal calon DPM Jurusan Manajemen sehingga seluruh kuota dapat terpenuhi. Keesokan hari, pada saat Fit and Proper Test (FnP) tulis salah satu

dari bakal calon DPM Independen tidak dapat melengkapi berkas yang diwajibkan. Calon tersebut dinyatakan gugur, sehingga dapat dikatakan semua bakal calon DPM FEB UB adalah tunggal.

Fenomena ini terjadi karena kurangnya kaderisasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). “Permasalahan yang paling vital mengapa bakal calon DPM tunggal karena kurangnya kaderisasi dari HMJ,” ujar Hafizh. Kurangnya kaderisasi turut dilontarkan oleh Kahim Jurusan Manajemen, **Aditya Perwiratama**, “Kaderisasi secara struktural tidak ada dan secara kultural juga tidak intensif karena tidak terlalu fokus ke sana.” Menurut Kahim Jurusan Ilmu Ekonomi **Widodo Widiyanto**, kaderisasi hanya secara implisit dilakukan dalam pelaksanaan program kerja. Padahal, DPM sebagai pihak yang berwenang telah menginstruksikan HMJ untuk menanamkan kaderisasi secara kultural. Ketua DPM, **Dwi Agung Sabekti** menanggapi hal tersebut. “Peran dari HMJ terkait persiapan bakal calon DPM adalah mengenai rekomendasi untuk bakal calon DPM dari jurusan masing-masing. Pasti ada *effort* dari setiap HMJ dalam mempersiapkan calonnya. Secara kultural yang pasti HMJ harus mempersiapkan kaderisasi-nya, kalau secara struktural ya melihat dari KM dan sebagainya, ini *kan* DPM jurusan pasti memang program jurusan. HMJ sebagai penghimpun atau penanggung jawab untuk bagaimana mengirimkan calon-calonnya yang mereka rekomendasikan,” tuturnya. Hal ini membuktikan kurangnya koordinasi antara pihak DPM dan HMJ.

Selain kaderisasi, perizinan orang tua turut menjadi penyebab seperti yang dikatakan oleh Hafizh. “Awalnya banyak yang mendaftar, tetapi pada masa mendekati pengumpulan berkas terdapat kendala dari izin orang tua,” ungkapnya. Hal serupa juga dipaparkan oleh Widodo, “Mungkin ada beberapa hal kendala saat pengembalian formulir, salah satunya hal-halang restu orang tua.”

Penyebab lain adalah ketidakpahaman

bakal calon DPM terkait tugas pokok dan fungsi DPM. “Orang-orang belum banyak yang mengerti terkait fungsi dan cara kerja DPM itu bagaimana,” papar Farhan. Pria kelahiran Pasuruan ini juga mengatakan bahwa ada beberapa ketidaksiapan dari bakal calon DPM. “Setelah kita masuk, kita harus merencanakan program-program apa yang mau dibawa, mungkin di sini ada mahasiswa yang baru tergerak hatinya untuk mendaftar. Bisa jadi H-1 atau H-2, saat dia dihubungkan dengan rencana program-program, dia masih bingung dan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi maju,” paparnya.

Tak hanya itu, terdapat bakal calon DPM yang menolak karena memiliki fokus lain turut menjadi penyebab. “Ya, macam-macam alasannya, ada yang ingin buka usaha,” papar Farhan. Selain itu, terjadi ketidaklengkapan berkas administrasi pada salah satu bakal calon, “Ada yang sudah datang tapi kurang lengkap berkasnya, ibaratnya secara administratif calon itu sudah gugur karena dia tidak bisa memenuhi administrasi yang harus dikumpulkan,” ungkap Farhan.

Calon DPM tunggal menyebabkan hadirnya calon *dummy*. Hal tersebut ditegaskan oleh Agung, “Mau tidak mau harus memaknai *dummy*, inginnya partisipasinya banyak jadi tidak memerlukan *dummy*.” Calon *dummy* yang merupakan ilustrasi kotak kosong ini

sudah ada sejak tahun 2017 sebagai representasi dari kondisi yang tidak ideal. “Kalau kita berbicara soal ideal atau tidak, bisa dikatakan ideal jika memang banyak partisipan yang memiliki program sehingga kita bisa membandingkan,” tutur Farhan. Akan tetapi kondisi yang terjadi di FEB UB tahun ini bertolak belakang dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Secercah harapan pun muncul dari Agung, “Dengan adanya sistem yang baru ini, *E-vote* dan *coblos*, harapannya bisa menjadikan PEMILWA di FEB ini lebih meningkat antusiasnya karena secara sistem kita sudah lebih modern meskipun belum seratus persen *E-vote*.” Hafizh pun turut mengutarakan harapannya terkait

kaderisasi, “Mengenai kaderisasi KM kita harus punya semacam struktur atau alur yang pakem, di mana bisa digunakan oleh semua mahasiswa. Kalau di Himpunan Jurusan Akuntansi ada alur organisasi yang sudah pakem, di mana alur ini pasti diikuti oleh semua mahasiswa Akuntansi. Jadi mungkin saran buat di KM dari sekarang perlu ada semacam diskusi yang intens, sebuah kajian yang membahas mengenai kaderisasi atau kalau perlu di MUM FEB dibahas terkait kaderisasi,” tutupnya.



Indikator/Riega

**Chairunissa Firsta A.**

## Mirisnya Kondisi Demokrasi di FEB UB

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam lembaga resmi pemerintahan tentu terdapat pemisahan yang jelas, hal itu dikarenakan kekuasaan tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah. Tujuan pemisahan itu agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemerintahan dan muncul mekanisme *check and balance*, yaitu saling mengoreksi dan mengimbangi antar lembaga. Montesquieu memisahkan lembaga pemerintahan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kampus sebagai miniatur negara dan mahasiswa sebagai unsur masyarakat di dalamnya, juga menganut sistem tersebut. Begitu pun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), terdapat lembaga eksekutif yang diduduki oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sedangkan, lembaga legislatifnya yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Musyawarah Umum Mahasiswa FEB UB sebagai forum tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan. Mahasiswa yang akan menduduki posisi tertinggi di BEM dan DPM akan dipilih melalui Pemilihan Umum Mahasiswa Kelu-

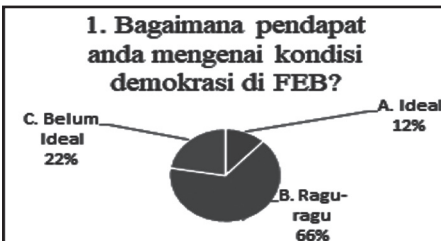
kan bahwa mahasiswa yang meragukan kondisi demokrasi di FEB UB masih tinggi sebesar 66%. Sedangkan data yang mengatakan belum ideal masih menduduki urutan kedua yaitu



22% dan 12% lainnya menyatakan sudah ideal.

Berdasarkan data yang kami dapatkan, mahasiswa FEB UB masih banyak yang mengerti demokrasi berdasarkan praktik. Pemahaman itu berdasarkan pembelajaran yang didapat di akademik dan tidak ada penambahan dengan membaca berbagai referensi lain.

Terbukti dari 53% mengatakan mengerti akan demokrasi berdasarkan praktik. Sedangkan, 42% mahasiswa paham akan demokrasi berdasarkan teori yaitu pemahaman yang didasarkan pada penambahan wawasan melalui hasil baca dari berbagai referensi. Selain itu, mahasiswa FEB yang memiliki pemahaman berimbang akan pengetahuan mengenai



arga Mahasiswa (PEMILWA KM) FEB UB. Kenyataannya, data penelitian menunjuk-



praktik maupun teori hanya sebesar 5%. Bersumber dari data di atas terdapat banyak

mahasiswa yang mengerti akan demokrasi berdasarkan praktik, tetapi tidak semuanya memahami secara mendalam akan hal tersebut. Terdapat 10% mahasiswa yang memiliki pemahaman kurang akan demokrasi secara praktik. Sementara yang mengerti secara mendalam hanya 15% mahasiswa. Kebanyakan dari mahasiswa masih paham dengan demokrasi



berdasarkan praktik dalam rentang 51-80%.

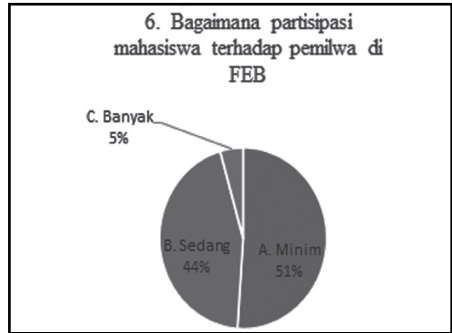
Data terkait pemahaman mengenai teori sendiri tidak jauh berbeda dengan praktik. Sebesar 57% mahasiswa memiliki pemahaman 51-80%. Mahasiswa yang mengerti apa itu demokrasi secara teori secara mendalam hanya



11%. Pemahaman mengenai demokrasi tersebut tentunya memiliki hubungan dengan pelaksanaan PEMILWA KM FEB UB itu sendiri.

Seperti yang telah disajikan di atas, sebesar 82% mahasiswa FEB mengetahui bahwa demokrasi memang berkaitan dengan PEMILWA KM FEB UB. Hanya 17% mahasiswa yang masih meragukan hubungannya dan 1% menyatakan tidak ada hubungan. Menurut Aristoteles, dalam demokrasi terdapat prinsip pergantian pemimpin. Hal itu selaras dengan

apa yang dilakukan di PEMILWA KM FEB UB untuk memilih eksekutif dan legislatif baru.



Tetapi dalam kenyataannya, PEMILWA KM FEB UB atau biasa disebut dengan pesta demokrasi ini belum terlihat euforianya.

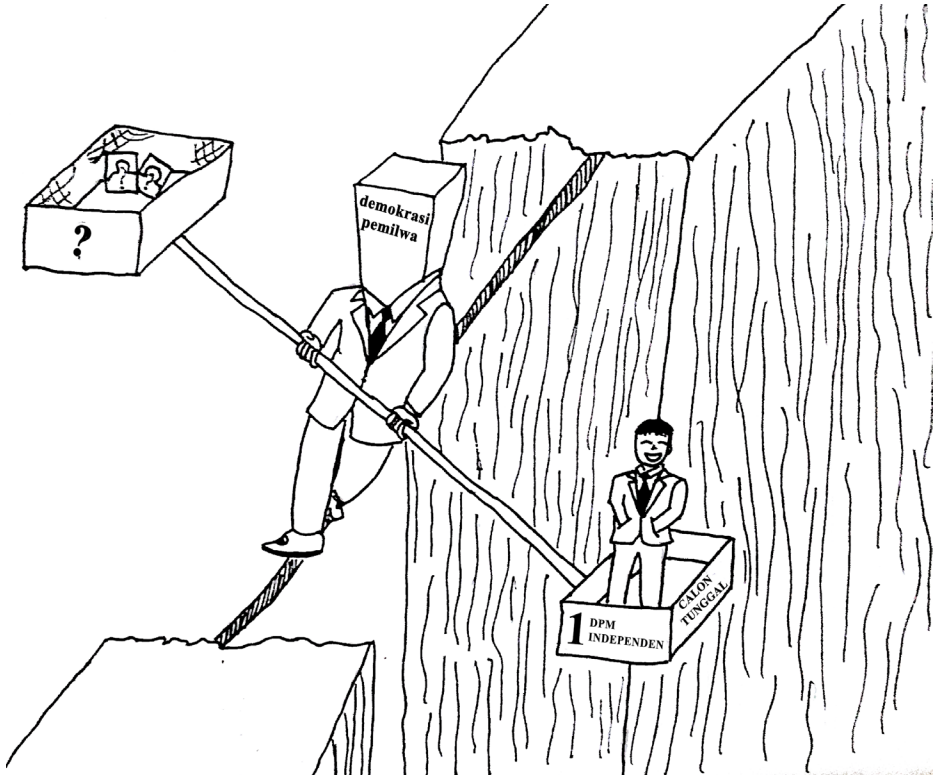
Menurut data yang disajikan di atas, terdapat 51% responden yang mengatakan bahwa partisipasi mahasiswa dalam PEMILWA KM FEB UB pada tahun ini minim. Dengan jumlah yang tidak jauh berbeda, 44% mengatakan sedang, dan 5% lainnya mengatakan sudah banyak partisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa mahasiswa masih meragukan kondisi demokrasi di FEB UB. Hal itu terbukti dari pesta demokrasi ini yang masih minim partisipasi. Penyebab akan permasalahan itu dapat terlihat dari pemahaman mahasiswa FEB UB akan demokrasi itu sendiri.

#### Keterangan:

Penelitian ini tidak bermaksud menggeneralisasikan pendapat mahasiswa FEB UB. Kuesioner ini berjumlah 210, yang disebarluaskan untuk mahasiswa lama dan mahasiswa baru per jurusan sebanyak 35.

**Yoana Kresentia S.**



Riega Gita P. D.



Indikator/Yasser

## Ciptakan Pilihan Rasional dalam Pemilwa

oleh: Winda Hafidhah H. \*

Indonesia menjunjung tinggi demokrasi yang berakar pada prinsip dasar yang tak bisa dipisahkan dalam praktiknya. Salah satu bagian dalam prinsip tersebut adalah kemampuan intelegensi. Prinsip intelegensi haruslah menjadi dasar dalam pembentukan dan pengambilan keputusan rasional dalam setiap aktivitas berdemokrasi.

Keputusan yang berpijak di atas fondasi rasionalitas akan membentuk kerangka dasar demokrasi yang bertanggung jawab. Demokrasi yang bertanggung jawab dimaknai sebagai perilaku yang disokong oleh pemikiran sehingga bermuara kepada kesadaran individu akan keseimbangan hak dan kewajibannya.

Konsep demokrasi bertanggung jawab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) dapat diimplementasikan secara nyata dalam ajang kontestasi elektoral yang bertajuk Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (PEMILWA KM) FEB UB. Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB memberikan hak pilih kepada setiap anggota untuk menentukan pemegang tongkat estafet kepemimpinan lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas maupun jurusan selanjutnya. Dalam konteks elektoral, demokrasi bertanggung jawab menuntut setiap orang untuk sadar akan hak pilih serta kewajiban menggunakannya dengan bijak. Menggunakan hak pilih dengan bijak dapat dilakukan apabila orang tersebut telah memiliki pemahaman mendalam

mengenai kualitas calon yang tersedia.

Perwujudan tanggung jawab atas hak pilih yang dimiliki anggota KM FEB UB dapat dilakukan melalui proses pengawalan dalam setiap rangkaian PEMILWA KM FEB UB. Proses pengawalan dapat dikerucutkan ke dalam rangkaian yang mewadahi calon untuk unjuk kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin. Hal itu dilakukan guna menumbuhkan pemahaman pemilih atas kandidat yang ada. Partisipasi aktif seperti pengawalan penting untuk membentuk diri menjadi konstituen rasional demi menjunjung tinggi demokrasi yang bertanggung jawab.

Panitia pelaksana telah menyediakan wadah untuk mencari tahu kualitas kandidat dalam hasil Fit and Proper Test (FnP), forum Musyawarah Umum Mahasiswa Jurusan (MUMJ), Kampanye Bersama, dan Debat Terbuka. Namun, wadah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terlihat ketika pelaksanaan MUMJ dan Kampanye Bersama yang sepi. Fenomena ini sangat disayangkan sebab keterlibatan mahasiswa dalam agenda tersebut merupakan tolok ukur rendahnya kepedulian mahasiswa terhadap kelangsungan demokrasi di FEB UB.

Minimnya partisipan dalam Kampanye Bersama dan MUMJ yang lekat dengan kegiatan PEMILWA KM FEB UB disebabkan oleh edukasi yang minim tentang pentingnya hak pilih. Tidak hanya itu, propaganda yang

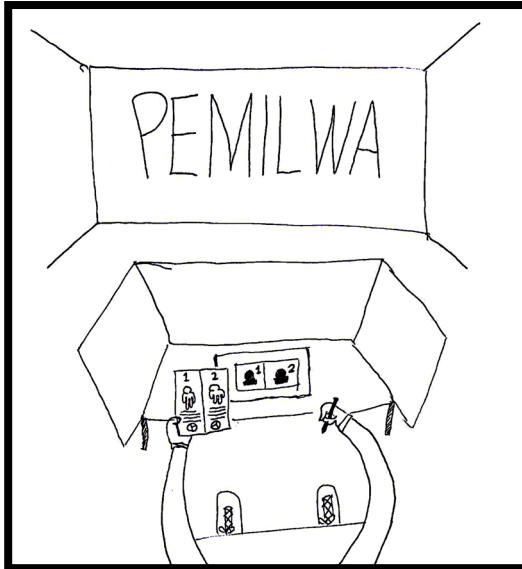
kurang menarik dari panitia serta minimnya kesadaran dan kepedulian KM FEB terhadap agenda ini juga merupakan faktor lain yang menjadi penyebab.

KM FEB UB yang enggan mencari tahu dan memahami kualitas calon melalui rangkaian kegiatan PEMILWA KM FEB UB akan berimbang pada hari pemilihan. Akibatnya akan muncul dua golongan yang melakukan penyalahgunaan hak pilih. Golongan pertama adalah calon pemilih pragmatis. Mereka adalah oknum yang menggunakan hak pilihnya tanpa melibatkan proses penalaran. Pilihan yang diputuskan didasarkan pada sentimen seperti memilih atas dasar popularitas, kedekatan, atau ajakan teman. Golongan berikutnya merupakan kelompok golongan putih (golput) lantaran krisis pengetahuan mengenai kandidat. Golput menjadi alternatif karena mahasiswa bersikap acuh sehingga enggan untuk melakukan pertimbangan analitis mengenai hak pilihnya. Kedua golongan ini akan berbahaya sebab akan memunculkan pemimpin yang tidak sesuai dengan kebutuhan KM FEB UB.

Sikap acuh dan pragmatis harus dibuang dari diri mahasiswa FEB UB. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung mahasiswa memaksa FEB UB untuk diam di tempat tanpa kemajuan. Seharusnya, KM FEB UB sebagai katalisator demokrasi yang bertanggung jawab di kampus menjalankan keseluruhan rangkaian kegiatan PEMILWA KM FEB UB dengan baik. Hal tersebut

dilaksanakan dalam rangka menambah pengetahuan mengenai kualitas calon sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan yang berdasar.

Menjadi pemilih rasional dapat dilakukan meski PEMILWA KM FEB UB hampir melalui puncak acara. Terdapat tiga cara



Indikator/Driantama

yang dapat direalisasikan. Cara pertama dengan melihat visi misi calon agar dapat menentukan pandangan. Cara kedua dengan melihat rekam jejak calon melalui pembicaraan dari mulut ke mulut serta melihat hasil FnP yang telah diunggah melalui *official account* PEMILWA. Pemilih juga dapat mencari tahu gaya dan isi penyampaian calon pada saat kampanye dengan

berdiskusi bersama teman yang hadir. Terakhir, calon pemilih dapat melihat kebutuhan KM FEB UB melalui pengamatan saat ini seaya membandingkannya dengan visi dan misi calon.

Partisipasi yang minim dalam PEMILWA KM FEB UB tidak hanya sekali terjadi. Berbagai solusi pemecahan masalah akan sia-sia apabila tidak diaplikasikan. Terdapat pepatah berbahasa Latin Kuno mengatakan bahwa suara rakyat adalah adalah suara Tuhan. Namun, apakah pepatah ini masih relevan jika rakyat yang diberi kesempatan untuk bersuara tidak memiliki intelektualitas yang mumpuni?

**\*Mahasiswi Jurusan Manajemen 2018**

# Miss-komunikasi, DPM Salah Publikasi MUM FEB UB

Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PEMILWA KM FEB UB) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UB serta tujuh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEB UB. Pada tahun ini terdapat kejadian yang cukup unik, yaitu DPM sempat mengumumkan bahwa akan diadakan Sidang Istimewa MUM FEB UB. Hal ini terjadi pada tanggal 17 November 2018, di mana DPM FEB UB telah mengumumkan akan diadakannya Sidang Istimewa MUM FEB UB. Fenomena ini bisa terjadi karena bakal calon yang mendaftar belum memenuhi kuota. Ketua DPM FEB UB, **Dwi Agung Sabekti** mengatakan, “Kondisinya waktu itu ketika pengembalian belum ada yang mengembalikan.” Sehingga, DPM FEB UB pun mengambil keputusan untuk memperpanjang waktu pengembalian formulir pendaftaran. Dalam Undang-Undang PEMILWA KM FEB UB 2018 dijelaskan bahwa batas maksimal perpanjangan masa pendaftaran adalah 7x24 jam. Apabila tidak ada bakal calon yang mendaftar maka akan ditindakanjuti dalam MUM FEB UB. Selama agenda PEMILWA KM FEB UB, DPM FEB UB telah melakukan *extend* selama 5x24 jam, dihitung dari tanggal

13-18 November 2018. Ternyata, saat pengumuman Sidang Istimewa MUM FEB UB tersebut, terdapat beberapa pertimbangan yang kurang matang dari DPM FEB UB. Sehingga, pada hari-H pelaksanaan, yaitu 18 November 2018, DPM FEB UB mengeluarkan surat permohonan maaf perihal Sidang Istimewa MUM FEB UB yang dibatalkan. Penyebabnya ialah

terjadinya *miss-komunikasi* dari DPM FEB UB. Agung memaparkan bahwa diadakannya MUM FEB UB harus disepakati oleh 2 per 3 anggota tetap, namun pada saat rapat kelembagaan

hanya tujuh orang dan tiga himpunan yang setuju untuk mengadakannya. “Kondisinya kemarin kurang satu orang atau satu kelembagaan, nah kesalahan kita kurang memastikan dulu, sehingga kita terlalu cepat mengeluarkan undangan,” ujar Agung. Di sini DPM FEB UB mengeluarkan surat permohonan maaf atas kurangnya pertimbangan untuk mengadakan Sidang Istimewa MUM FEB UB. Selain itu Agung juga mengatakan bahwa *jarkoman* tersebut merupakan kesalahan penulisan, di mana yang harusnya dilaksanakan adalah MUM FEB UB.



dok.Istimewa



**Bicara  
demokrasi**

**HP pelarian  
bosan**



**Lelah  
terlelap**



Foto dan Judul Foto: Muhammad Yaser Z.

**Minum dulu  
biar rileks**



**Pilih saya  
ya rek**



**Se-mic  
berdua**



Tata Letak: Rafli Martiansyah J.

## Suara si Calon

**Indi:** Bagaimana cara Anda menelaraskan program kerja yang sudah dibuat agar sesuai dengan kebutuhan KM FEB UB saat ini?

Bagus: “Pertama kita riset dari program yang sudah ada semenjak tiga tahun yang lalu. Selanjutnya, kita sesuaikan dengan Tridarma Perguruan Tinggi serta peran dan fungsi mahasiswa. Kedua, kita lihat lagi *student need* generasi sekarang dan juga berkolaborasi dengan himpunan. Kami mencoba melakukan kolaborasi dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mahasiswa. Sehingga kita memiliki basis data yang kuat agar bisa menentukan kebijakan.”

**Indi:** Apa *grand issues* di KM FEB UB yang akan Anda komodasiketikamenjabat?

Bagus: “BEM hari ini saya rasa jauh dari

masyarakat, sehingga terdapat beberapa upaya yang akan kami lakukan. Pertama, kami menawarkan untuk membantu permasalahan yang ada di KM FEB. Kedua, kita mencoba melihat emansipasi wanita hari ini seperti apa, khususnya di FEB, serta melihat beberapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Kami akan menyediakan panggung (wadah) untuk masyarakat berdiskusi bersama.”

**Indi:** Apa program kerja yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat?

Bagus: “Kita akan melakukan *brainstorming* terkait penguatan visi, misi, nilai untuk menguatkan fondasi BEM, sehingga mengerti apa yang akan dibawa dan diraih pada periode ini. Selanjutnya, saya ingin membuka dialog dengan pihak dekanat, LO, LSO, dan komunitas untuk membicarakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.”

**Indi:** Bagaimana cara Anda meningkatkan rasa kekeluargaan KM FEB UB?

Bagus: “FEB butuh sebuah lembaga yang mampu mengayomi dan membantu seluruh elemen di dalamnya untuk bersama-sama membangun fakultas ini. Contoh momen yang saya rasa kuat untuk mempersatukan FEB itu di olahraga. Saya *analisa*, oh ternyata alasan mereka datang ke GOR adalah sebuah rasa kebanggaan. Nah, rasa itulah yang kami pikir kurang tahun ini. Maka saya mengajak teman-teman untuk lebih dekat sama himpunan.”



Indikator/Vasser

## Suara si Calon

**Indi:** Bagaimana cara Anda menyelaraskan program kerja yang sudah dibuat agar sesuai dengan kebutuhan KM FEB UB saat ini?

Tazki: “Pertama *by* riset, akhirnya timbullah sebuah analisis mengenai kondisi masalah yang menghasilkan sebuah konklusi. Misal, banyak maba yang tidak teredukasi dalam membeli buku, solusinya dihadirkanlah semacam perpustakaan agar peminjaman buku (yang terpakai maupun tidak) tersampaikan dengan baik. Kemarin juga, habis juara umum Olimpiade Brawijaya, saya dan Yafida sadar ada potensi yang dimiliki oleh FEB. Jadi sayang jika tidak dimanfaatkan dengan membuat pengaderan serta pendampingan yang baik dan optimal.”

**Indi:** Apa *grand issues* di KM FEB UB yang akan Anda akomodasi ketika menjabat?

Tazki: “Saya menaruh sedikit perhatian terhadap pengembangan minat dan bakat di FEB. Melalui pendampingan yang optimal dan memperbaiki kendala pada sektor dana delegasi. Saya pikir BEM sebagai fasilitator seharusnya bisa *mengoordinir* dari segala pihak. Hal itu akan meningkatkan iklim *prestatif* yang ada di FEB UB.”

**Indi:** Apa program kerja yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat?

Tazki: “Saya ingin mempertahankan *branding*, seperti menghadirkan *Halo KM*. Kita coba duduk bersama mendengar aspirasi mahasiswa dengan mempertemukan semua *stakeholders* baik birokrat, badan eksekutif jurusan, dan legislatif. *Gak* cuma ke pihak birokrasi, sinergisitas antarlembaga seperti LSO dan komunitas juga perlu diperbaiki.”

**Indi:** Bagaimana cara Anda meningkatkan rasa kekeluargaan KM FEB UB?

Tazki: “Saya dan Yafida terjun langsung

dengan teman-teman lainnya, sehingga terjadi sinergisitas antarlembaga. Kekeluargaan itu tidak bisa dipaksakan tapi akan tercipta dengan sendirinya. Ketika dirasa sudah optimal kita bisa bahu-membahu, sehingga banyak yang terjun menjadi *role model*. Saya juga dalam tahap memperbaiki dan memantaskan diri hingga nanti bisa menjadi *public figure* yang baik.”



Indikator/Yasser

**Nisrina Nursyiana**

## Di Bawah Kehidupan Para Raksasa dan Sekumpulan Tikusnya

Film garapan Hanung dan Rahabi kali ini yang bertema *political-thriller* dibalut secara apik dan menegangkan. Film 2014 ini memang mengadaptasi situasi dan kondisi Indonesia terutama sistem politiknya. Bertujuan untuk menghibur serta bermain aman, film ini memilih jalan fiksi untuk membeberkan ceritanya. Walaupun dominan mengenai kehidupan mengenai politik, Hanung dan Rahabi menambahkan bumbu-bumbu drama percintaan, selain itu masalah ayah dan anak pun ikut menyempurnakan jalan cerita film ini.

Keseruan cerita dimulai dari kejadian yang tak terduga. Sebut saja Ricky, anak dari seorang kandidat Calon Presiden 2014, yang ayahnya bernama Bagas Notolegowo. Ayah Ricky divonis mati atas tuduhan kasus pembunuhan. Ricky pun mulai bertindak demi membebaskan sang ayah dari tuduhan tersebut. Dalam perjalanan menyelamatkan ayahnya, Ricky bertemu dengan pengacara idealis, Khrisna Dorojatun dan juga anaknya yang bernama Laras. Ketika menjadi pengacara ayah Ricky, Khrisna mati tertembak. Ricky putus asa dan berencana untuk pergi, namun Laras datang dan menyuruhnya agar menyelesaikan masalah yang terjadi.

Perjuangan berlanjut, Ricky dibantu oleh Laras dan teman-teman lainnya membuat

rencana baru dengan menggunakan sosial media. Rencana Ricky pun berhasil, ia diundang dalam acara *talkshow* bersama dua kandidat Calon Presiden 2014, Faisal Abdul Hamid dan Syamsul Triadi. Di tengah acara *talkshow* tiba-tiba terjadi kekacauan, Faisal Abdul Hamid tertembak mati. Di sisi lain, terjadi pertarungan antara dua polisi Iptu Astri dan partnernya melawan Satria, polisi yang berkhianat. Satria pun tertembak mati oleh Laras dan pertarungan selesai. Setelah mengalami beberapa sidang, Bagas Notolegowo akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Lalu ketika hari pemilu tiba, Bagas Notolegowo pun berhasil ditetapkan sebagai Presiden 2014.

Kelebihan dari film ini adalah alur cerita yang tidak membosankan penonton. Salah satu faktor pendukungnya adalah fokus cerita tidak melebar sehingga mudah untuk dipahami. Penggambaran tokoh dari para pemain jelas sesuai dengan peran dan sifatnya. Terakhir, yang membuat film ini bertambah seru adalah cerita yang tidak mudah ditebak dari segi alur cerita maupun peran salah seorang tokoh. Di balik beberapa kelebihannya, terdapat beberapa *scene* pertarungan yang berdurasi lama sehingga membuat penonton merasa bosan.



dok.Istimewa

Judul Film : 2014, Siapa di Atas Presiden?  
 Durasi : 110 menit  
 Rilis : 26 Februari 2015  
 Sutradara : Hanung Bramantyo, Rahabi Madra

Nadira Maysa S.



Indikator Yasser

## Penerapan *E-vote* Parsial, Tujuan Tak Maksimal

Pada Desember 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) kembali melaksanakan Pemilihan Wakil Mahasiswa (PEMILWA). Menurut Undang-Undang Pemilihan Wakil Mahasiswa 2018 Pasal 1 Ayat 7, PEMILWA adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa (KM) FEB UB. Seluruh anggota KM FEB UB yang memiliki hak pilih turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, **Farhan Hariadi Pratama** selaku Ketua Pelaksana PEMILWA KM FEB UB mengungkapkan bahwa partisipan dari PEMILWA KM FEB UB ialah seluruh mahasiswa S1 aktif FEB UB. Kandidat yang akan dipilih ialah Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEB UB, dan Ketua Himpunan masing-masing jurusan. Puncak acara PEMILWA KM FEB UB, yaitu pemilihan, akan diadakan pada tanggal 5 Desember 2018 dan bertempat di Basemen Gedung E FEB UB dengan tiga tempat pemungutan suara.

Pada tahun ini, PEMILWA KM FEB UB

mengalami sebuah perubahan sistem, yakni *E-vote*. Perubahan ini bisa terjadi berdasarkan hasil pertemuan antara Wakil Dekan (WD) III dengan anggota DPM FEB UB ketika sosialisasi program kerja. “Sudah ada pembicaraan sejak awal pas perencanaan program kerja fakultas,” tutur **Moh. Athoillah, S.E., M.E.** selaku Staf Ahli WD III. Fenomena ini diperkuat dengan hasil rapat antara WD III dengan Wakil Rektor III yang menyatakan bahwa Pemilwa dan Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) akan dilakukan secara serentak dengan menggunakan sistem *E-vote*. “Kesepakatan itu pokoknya semua fakultas di Brawijaya pada pelaksanaan Pemira dan Pemilwanya itu semuanya harus menggunakan *E-vote*. Itu harus *diakomodir* seluruh pemilihan baik itu di universitas maupun di fakultas,” tambah Atho.

Atho juga mengungkapkan bahwa tujuan diberlakukannya *E-vote* ialah untuk mengefisienkan biaya, waktu, serta menghindari kecurangan pada saat pemilihan. “Dalam penggunaan sistem *E-vote*, biaya yang dikeluarkan untuk surat suara tidak ada sama

sekali. Seumpama tiga jam untuk menghitung surat suara, maka tiga jam itu akan hilang dengan adanya *E-vote*. Hal itu (kecurangan) bisa kita minimalkan dengan menggunakan *E-vote* karena penyalahgunaan, mahasiswa aktif yang seharusnya punya hak suara ternyata tidak bisa memilih karena sistem manual, dan itu tidak akan terjadi *kalo pake E-vote*,” papar Staf Ahli WD III ini. Sistem *E-vote* ini dirancang dan disediakan oleh TIK yang mengakomodasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa, DPM UB, Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta DPM Fakultas.

Namun sayangnya, pada PEMILWA KM FEB UB 2018 sistem *E-vote* hanya berlangsung secara parsial. Farhan menerangkan bahwa sistem *E-vote* hanya digunakan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM serta DPM Independen. Sedangkan, pemilihan Ketua Himpunan dan DPM Jurusan menggunakan surat suara.

Fenomena ini bisa terjadi karena pihak DPM FEB UB menunggu koordinasi dari pusat, yakni panitia Pemira. “Memang betul kita akhirnya menunggu koordinasi teman-teman Pemira dengan pihak TIK terkait dengan PEMILWA di fakultas,” ujar **Dwi Agung Sabekti** selaku Ketua DPM FEB UB 2018. Selain itu, tata cara PEMILWA KM FEB UB yang berbeda dengan Pemira dan Pemilwa fakultas lain pun turut menjadi penyebabnya. “Pelaksanaan PEMILWA di FEB ini kompleks

gitu. Ada beberapa *case* yang ini berbeda dengan fakultas lain.” Dalam PEMILWA KM FEB UB, DPM dari perwakilan jurusan dan ketua himpunan jurusan turut menjadi kandidat yang akan dipilih pada hari pemilihan. Sedangkan sistem yang dibuat oleh Unit Tek-

nologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat mengakomodasi hal tersebut.

Melihat perbedaan ini, DPM FEB UB menginisiasi untuk berkoordinasi dengan pembuatan sistem yaitu TIK terkait

sistem pemilihan yang ada di FEB UB. Namun, TIK tidak menyanggupi untuk membuat sistem khusus bagi PEMILWA KM FEB UB. Selanjutnya, DPM bersama dengan Ketua Pelaksana PEMILWA KM FEB UB berinisiatif meminta bantuan kepada Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur, TI, dan Kehumasan (PSIK) untuk membuat sistem *E-vote* yang sesuai dengan keadaan di FEB UB. “Jadi kita juga sudah *ngomong* ke PSIK, tapi dari merekanya belum menyanggupi. Alasannya karena ini hanya hitungan bulan, mungkin kalau tahun depan bisa,” ucap Farhan. Hal ini selaras dengan ungkapan dari **Agus Widyatama, S. Kom.** selaku Kepala Urusan Hubungan Masyarakat di PSIK. “Mendesain sistem itu harus tahu kebutuhannya seperti apa, nah itu baru bisa disaring kira-kira waktunya butuh berapa lama, tidak langsung satu bulan bisa selesai kayak gitu,” tutup Agus.

Penerapan *E-vote* yang parsial ini menyebabkan tujuan diadakannya sistem



Indikator/Danar



dok. Istimewa

*E-vote*, seperti efisiensi biaya, waktu, serta penghindaran kecurangan, pada akhirnya tidak dapat tercapai secara maksimal. “Jika *ngomongin* tercapai apa enggak, ya kita di sini *step to step*. Kita di sini mungkin tujuannya tidak sepenuhnya tercapai, tetapi di sini sudah mulai menggunakan *E-vote*. Ya tujuan kita buat mengefisiensi dan lain-lain tadi tercapai, *tapi* ibaratnya belum tercapai dengan sepenuhnya,” tutur Farhan. Dalam segi biaya, memang lebih minim dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menggunakan surat suara secara keseluruhan. Namun jika dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan, keadaan ini jelas menunjukkan suatu ketimpangan. Selain itu, panitia tetap harus melakukan proses penghitungan suara yang akan memakan waktu lebih lama dan berpotensi untuk terjadi kecurangan.

Menanggapi hal tersebut, harapan pun muncul dari Ketua Pelaksana PEMILWA KM FEB UB terkait teknis dan penerapan

sistem *E-vote* untuk tahun depan. “Harapan ke depannya, *E-vote*-nya bakal jadi *E-vote* sepenuhnya, karena di sini jika terbukti lebih efektif dan lebih aman, ya sudah alangkah baiknya tahun depan itu semuanya *dibikin E-vote*,” tutupnya.

Danar Nugraha



Yesica Agustina



Indikator/Yasser

## Hak Pilih Sirna, Demokrasi Hilang Makna

Oleh: Adinda Nabila P. A.\*

**A**braham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 memiliki gagasan tersendiri mengenai demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari buah pikiran tersebut adalah rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, di mana rakyat dituntut untuk memilih dan mengawasi wakilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Salah satu penerapan demokrasi di Indonesia adalah dengan diadakannya pemilihan umum (pemilu), yaitu proses memilih wakil rakyat. Sementara itu, penyelenggaraan demokrasi juga diterapkan di perguruan tinggi yang sering kali disebut sebagai miniatur negara. Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) juga melakukan hal serupa yaitu dengan diadakannya Pemilihan Wakil Mahasiswa (PEMILWA). Sama halnya dengan pemilu, mahasiswa diibaratkan sebagai rakyat yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak pilih merupakan hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, semua mahasiswa FEB UB memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hak tersebut telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa (ART KM) FEB UB 2018. Di antaranya pada Bab I Pasal 3 Ayat 3 mengenai hak anggota KM FEB UB, yaitu “Setiap anggota

KM FEB UB memiliki hak memilih dan dipilih”. Dijelaskan juga pada Pasal 1 Ayat 1, bahwasanya, “Anggota dari KM FEB UB adalah mahasiswa aktif S1 FEB UB”.

Berbicara mengenai hak pilih mahasiswa, ternyata mahasiswa baru (maba) Jurusan Akuntansi tidak memiliki hak untuk memilih ketua himpunan (kahim) jurusannya. Sampai tulisan ini dibuat, belum ada keputusan bahwa maba Jurusan Akuntansi berhak memilih kahimnya. Peraturan tersebut diatur dalam ART Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Pasal 3 Ayat 2, “Anggota muda tidak berhak mengikuti segala kegiatan HMJA yang dinyatakan bersifat khusus oleh Ketua Umum HMJA”. Anggota muda yang dimaksud adalah Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi yang belum melewati Program Pengenalan Jurusan Akuntansi yang ditetapkan oleh HMJA berdasarkan ART HMJA Pasal 1 Ayat 2 (a). Dengan begitu, maba Akuntansi tidak memiliki hak dalam memilih kahim jurusannya. Peraturan HMJA tersebut bertentangan dengan ART KM FEB UB pada Bab VII tentang HMJ Pasal 38 Ayat 2. Peraturan tersebut berbunyi “HMJ wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART KM FEB UB” sehingga seluruh peraturan HMJ wajib menaati ART KM FEB UB. Selain itu, bisa dilihat pada Pasal 40 Ayat 1 yang menjelaskan lebih detail bahwa AD/ART HMJ tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KM FEB UB.

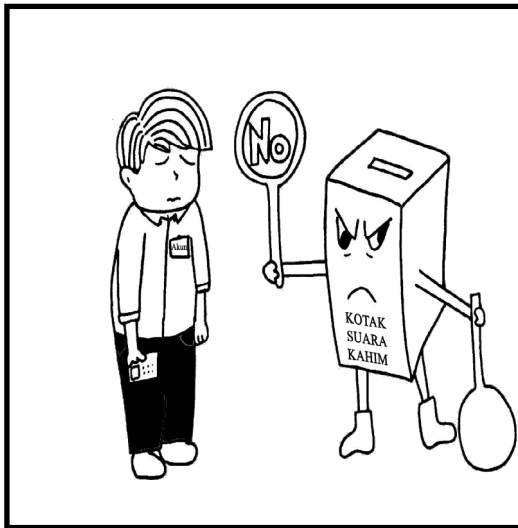
Fenomena mengenai hak pilih ini terjadi dikarenakan maba belum memiliki pengetahuan akan calon ketua himpunan (cakahim) jurusannya. Jika dilihat kembali ke ART HMJA, maba merupakan anggota muda yang belum melewati Program Pengenalan Jurusan Akuntansi. Oleh karena itu, mereka dirasa belum bisa meninjau bakal cakahim jurusannya dan masih kurang berpengalaman di kehidupan kampus. Maba Akuntansi pun tidak memperoleh hak pilih dan mereka akan kehilangan semangat untuk mencari tahu cakahim jurusannya. Apabila tidak dapat dipilih, untuk apa dikenal dan digali latar belakang calon tersebut.

Imbas kondisi di atas menunjukkan demokrasi di dalam kampus tidak dapat berjalan dengan semestinya. Demokrasi yang dituju untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang mana harus dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat malah kehilangan makna. Mahasiswa, termasuk maba diibaratkan sebagai rakyat yang semestinya memiliki hak untuk memilih demi kesejahteraan mereka. Jika kondisinya seperti itu, bagaimana maba mengenal demokrasi di dalam kampus? Yang ada, justru rasa ketidaktahuan yang semakin membengkak.

Menilik permasalahan hak pilih tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan mahasiswa khususnya maba. Pertama, memaksimalkan wadah yang ada seperti Musyawarah Umum Mahasiswa Jurusan (MUMJ) dan debat terbuka. MUMJ adalah forum ter-

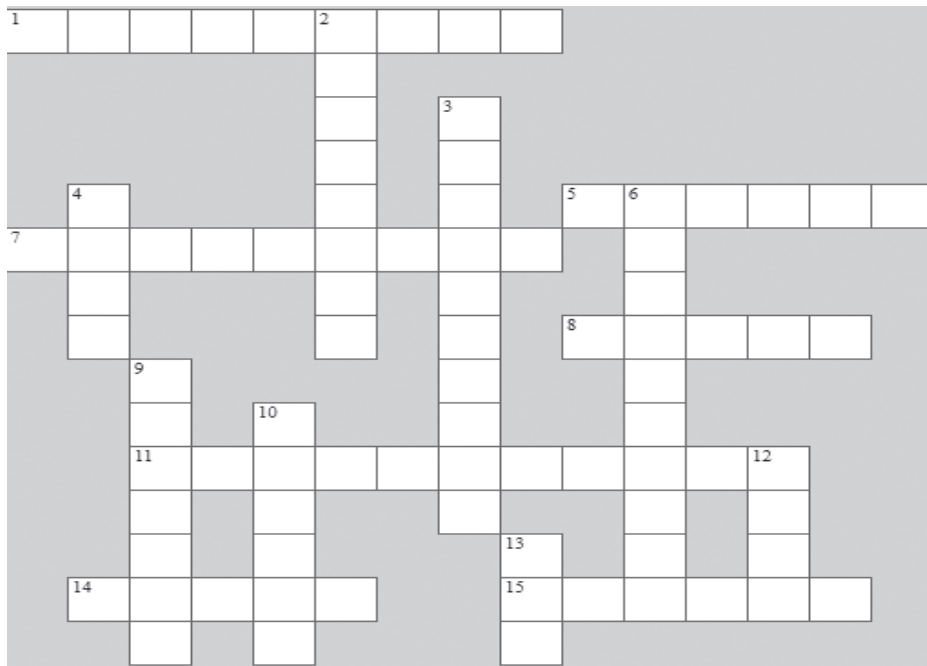
tinggi untuk mahasiswa jurusan di FEB UB dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh masing-masing HMJ. Salah satu pembahasan di dalam MUMJ adalah mengenai cakahim jurusan, sehingga diperlukan kesadaran mahasiswa untuk menghadiri MUMJ agar lebih mengenal cakahimnya. Sementara itu, debat terbuka adalah debat antar kandidat PEMILWA KM FEB UB. Mahasiswa diharapkan berperan aktif seperti bertanya ketika debat terbuka berlangsung sehingga ada interaksi antara mahasiswa dan calon wakil mahasiswa.

Selain dengan memaksimalkan wadah yang sudah ada, lembaga terkait juga dapat membentuk forum yang terdapat pengawasan di dalamnya. Hal itu ditujukan agar maba tidak dijadikan sebagai boneka politik. Maba yang belum mengerti politik kampus dikhawatirkan akan terkena *brainwash* dan bertendensi pada salah satu pihak. Dengan adanya forum yang terdapat pengawasan, pembentukan pengetahuan mengenai calon wakil mahasiswa dapat dilaksanakan dengan semestinya tanpa ada hasutan dari pihak lain. Jika pengetahuan maba mengenai cakahimnya bertambah maka pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan dan menindaklanjuti permasalahan menyangkut hak pilih ini ke depannya.



Indikator/Nabila

tinggi untuk mahasiswa jurusan di FEB UB dan mekanisme pelaksanaannya diatur oleh masing-masing HMJ. Salah satu pembahasan di dalam MUMJ adalah mengenai cakahim jurusan, sehingga diperlukan kesadaran mahasiswa untuk menghadiri MUMJ agar lebih mengenal cakahimnya. Sementara itu, debat terbuka adalah debat antar kandidat PEMILWA KM FEB UB. Mahasiswa diharapkan berperan aktif seperti bertanya ketika debat terbuka berlangsung sehingga ada interaksi antara mahasiswa dan calon wakil mahasiswa.



### Mendatar

1. Logo kuda dalam PEMILWA KM FEB UB memiliki arti...
5. Pelanggaran tentang atribut kampanye merupakan jenis pelanggaran...
7. Dalam pelaksanaan PEMILWA KM FEB UB, Musyawarah Umum Masyarakat FEB UB selaku kekuasaan...
8. *Tagline* PEMILWA KM FEB UB 2018...
11. Salah satu nilai yang terkandung dalam *tagline* "TEGAS"...
14. Jumlah anggota DPM yang akan terpilih pada pelaksanaan PEMILWA KM FEB UB 2018...
15. Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan PEMILWA KM FEB UB...

### Menurun

2. Salah satu fungsi DPM yaitu...
3. Tahap pemeriksaan dan penelitian syarat administratif calon peserta PEMILWA KM FEB UB disebut...
4. Sebelum didelegasikan ke PEMILWA KM FEB UB, calon DPM jurusan harus mendapatkan rekomendasi dari...
6. Esensi warna hitam dalam logo PEMILWA KM FEB UB 2018...
9. Sanksi pelanggaran berat adalah yang tertera pada pasal 25 ayat 3 serta pengurangan jumlah suara sebanyak ... persen
10. Mahasiswa yang tidak menggunakan hak suaranya disebut...
12. Jumlah nilai yang diangkat dari *tagline* "TEGAS"...
13. Pembentukan panitia PEMILWA KM FEB UB diresmikan dengan ketetapan...



**KAYE**  
DESSERTS

**LOOKING FOR PARTNERSHIP  
AND RESELLER**

**WE ALSO OFFER COLOABORATION  
WITH ORGANIZATION  
FOR SELLING OUR PRODUCT  
WITH MANY PACKAGES  
AND SPONSORSHIP**

**WANT TO LEARN MORE?  
CALL US!**

 **KAYE.DESSERTS**

 **@KAYE.DESSERTS**

**WHATSAPP : 0812-2048-3430(RAYHAD) & 0878-7792-7797(LANJAR)**